



Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Magang Melalui Kontribusi Dalam Tata Kelola Persidangan Dan Komunikasi Publik Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Amelia Griseldis^{1*}, Hezron Arialby Mengkepe², Firayanti M. Kadu³, Hafez Gibraltar⁴, Alyaumi Wahyustiani⁵, Elsa Bulawan⁶, Belona Danduru Salurante⁷

¹⁻⁷ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tadulako

^{1*} ameliagriseldis1106@gmail.com , ² abymengkepe@gmail.com , ³ firayantimk99@gmail.com , ⁴ hafezgibraltar@gmail.com , ⁵ alyaumi905@gmail.com , ⁶ elza060880@gmail.com , ⁷ belonadanduru91@gmail.com

Abstrak

Program magang merupakan kebijakan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satu implementasinya adalah kegiatan magang di instansi pemerintahan. Penelitian ini disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama empat bulan di Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rapat paripurna, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung layanan administrasi dan publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, keterlibatan aktif dalam tugas, dan komunikasi informal dengan pegawai. Narasumber penelitian ini terdiri dari staf Sub Bagian Persidangan serta staf Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang paripurna. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang berkontribusi aktif dalam mendukung administrasi persidangan, penyusunan notulen hasil rapat dan risalah rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta koordinasi teknis pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna.

Kata Kunci : Kompetensi Mahasiswa, Tata Kelola Persidangan, Komunikasi Publik, Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Abstract

The internship program is a policy that provides opportunities for students to gain hands-on experience in the workplace. One implementation is internships in government agencies. This research was compiled based on internship activities carried out by students for four months in the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. Through direct involvement in the implementation of plenary sessions, students not only gain administrative experience, but also develop professional competencies that are relevant to the needs of the world of work, as well as support administrative and publication services. This study aims to analyze the development of student intern competencies through contributions to Trial Governance and Public Communication at plenary sessions of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. The methods used in this activity include direct observation, active involvement in tasks, and informal communication with employees. The sources for this research consisted of staff from the Trial Sub-Section and Public Relations and Protocol staff of the Central Sulawesi Provincial Representative Council who were directly involved in the implementation of the plenary session. Data validity was obtained through source triangulation techniques by comparing the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the interns actively contributed in supporting the administration of the trial, preparing meeting minutes and minutes of meetings, managing activity documentation, and technical coordination of the implementation of plenary meetings. In addition, this study shows that the synergy between the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations at the plenary session of the Central Sulawesi Provincial Representative Council is an important factor in supporting the effectiveness of the implementation of plenary sessions.

Keyword : *Student Competence, Court Governance, Public Communication, Plenary Session, Regional Representative Council (DPRD) Sulawesi Tengah*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori di ruang kelas, tapi juga pada pengembangan kompetensi mahasiswa melalui praktik di dunia kerja. Dalam menghadapi tuntutan profesionalisme di era modern, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan akademik yang seimbang dengan praktik lapangan, seperti kemampuan komunikasi, koordinasi, administrasi, dan pemecahan masalah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi individu yang berilmu, kompeten, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi Masyarakat dan Negara. Namun, masih banyak mahasiswa yang memiliki keterbatasan pengalaman praktik dalam memahami tata kelola pemerintahan, khususnya pada kegiatan persidangan dan komunikasi publik dalam rapat paripurna di lembaga legislatif. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan persidangan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan dukungan administrasi, dokumentasi rapat, dan komunikasi publik yang efektif agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program magang menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan pembelajaran teoritis dengan praktik lapangan yang melibatkan secara langsung mahasiswa dalam tata kelola persidangan dan komunikasi publik dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Maitri menjelaskan bahwa kegiatan magang dan studi independen juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar secara langsung (*experiential*

learning) di tempat kerja/industri yang dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi.[1] Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Salfia dan Hanung mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan magang, mahasiswa akan mengalami keterlibatan langsung dan mendalam di dunia kerja dengan durasi waktu yang setara dengan magang profesional. Pengalaman ini tidak hanya memberikan gambaran nyata tentang lingkungan kerja, tetapi juga membantu membangun relasi di industri, serta menunjang pengembangan karier setelah lulus.[2] Penelitian mengenai pelaksanaan program magang juga dilakukan oleh Rosmiyati dkk. yang menunjukkan bahwa kegiatan magang pada instansi pemerintahan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang administrasi publik, komunikasi organisasi, dan pelayanan kelembagaan melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja.[3]

Penelitian Noya dkk. menjelaskan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dipengaruhi oleh kualitas pelayanan administrasi dan koordinasi organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.[4] DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Rapat Paripurna menjadi forum resmi pengambilan keputusan dan pembahasan agenda strategis daerah yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Pelaksanaan rapat paripurna membutuhkan tata kelola persidangan yang terstruktur, mulai dari koordinasi antarbagian dan penyusunan administrasi persidangan, hingga pengelolaan komunikasi publik. Selain itu, tata tertib pelaksanaan rapat paripurna juga mengacu pada peraturan internal DPRD yang mengatur mekanisme persidangan, kuorum kehadiran, tata cara pengambilan keputusan, serta penyusunan administrasi persidangan. Dalam proses tersebut, mahasiswa magang turut dilibatkan dalam berbagai kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan rapat. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila menjelaskan bahwa bagian persidangan memiliki peran penting dalam mendukung fungsi legislatif DPRD melalui penyusunan risalah rapat, pengarsipan dokumen persidangan, serta pengelolaan administrasi rapat secara sistematis.[5]

Namun demikian, keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan pemerintahan sering kali masih dipandang sebatas dukungan teknis administrasi, sehingga aspek pengembangan kompetensi mahasiswa belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, pengalaman partisipasi dalam lingkungan kerja pemerintahan memiliki kontribusi penting dalam membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja profesional. Selain itu, kajian mengenai kontribusi mahasiswa magang dalam tata kelola persidangan dan komunikasi publik di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pelaksanaan rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam tata kelola persidangan dan komunikasi publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran mahasiswa dalam mendukung kegiatan persidangan serta kontribusinya terhadap pengembangan kompetensi profesional mahasiswa di lingkungan pemerintahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,[6] yang digunakan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilaksanakan selama periode kegiatan magang pada Sub Bagian Persidangan dan Sub Bagian Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Tahapan Penelitian

Untuk memberikan gambaran jelas tentang urutan kerja penelitian ini, tahapannya dibagi menjadi 4 fase utama. Pertama, dimulai dari identifikasi masalah dengan melihat langsung fenomena di lapangan soal tata kelola persidangan, komunikasi publik, dan keterlibatan mahasiswa magang di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah itu, lanjut ke pengumpulan data untuk mencari informasi mendalam dari narasumber atau sumber yang tepat dan menggunakan instrumen yang relevan. Jika data sudah terkumpul, dilakukan uji keabsahan data agar hasilnya valid dan objektif. Terakhir, masuk ke tahap analisis data di mana semua data mentah tadi diolah menjadi narasi deskriptif yang bisa menjawab rumusan masalah.

B. Sumber Data

Informan penelitian ditentukan menggunakan keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap proses persidangan serta komunikasi publik pada rapat paripurna.

Tabel 1. Profil informan dan instrumen yang digunakan

No.	Sumber Data / Informan	Teknik Pengumpulan Data	Output Data yang Diharapkan
1.	Staf Sub Bagian Persidangan DPRD Prov. Sulteng	Wawancara Semi-Terstruktur	Data pelaksanaan tata kelola persidangan & kontribusi magang
2.	Staf Sub Bagian Humas Protokol DPRD Prov. Sulteng	Wawancara Semi-Terstruktur	Data komunikasi publik rapat paripurna & perkembangan kompetensi
3.	Aktivitas Administrasi & Rapat Paripurna	Observasi Partisipatif	Catatan lapangan proses kerja nyata mahasiswa magang

4.	Dokumen Internal (Notulen, Arsip, Foto Kegiatan)	Dokumentasi [7]	Data pendukung otentik pelaksanaan tugas
----	--	-----------------	--

C. Penerapan Metode dan Pengujian Keabsahan Data

Pengumpulan data di Lapangan diterapkan secara sekaligus. Observasi dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan administrasi persidangan dan komunikasi publik pada rapat paripurna. Bersamaan dengan itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali perspektif staf serta capaian kompetensi mahasiswa.

Untuk menjamin kualitas dan pengujian metode dalam mendapatkan hasil yang objektif, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dan menyilangkan data hasil observasi di lapangan, transkrip wawancara dengan para staf, serta bukti dokumentasi yang dikumpulkan.

D. ANALISIS DATA

Data yang telah dinyatakan absah kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan interaktif.[8] Proses ini diawali dengan reduksi data untuk menyortir, memfokuskan, dan membuang data mentah yang tidak relevan dengan kompetensi magang. Selanjutnya, dilakukan penyajian data (*display data*) dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk matriks naratif agar pola kontribusi magang terlihat jelas. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dilakukan untuk merumuskan hasil akhir sebagai gambaran utuh mengenai pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui keterlibatan mereka dalam tata kelola persidangan dan komunikasi publik di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rapat Paripurna merupakan forum resmi dan tertinggi dalam lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai wadah musyarah utama dalam pengambilan keputusan strategis terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.[9] Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam yang dilakukan selama empat bulan masa magang, data penelitian dikelompokkan ke dalam dua pilar utama, yaitu kontribusi pada tata kelola komunikasi publik (Sub Bagian Humas dan Protokol).

No.	Pilar Fokus Kerja	Jenis Teknis	Aktivitas	Output Administrasi / Visual	Ragam Kompetensi yang Berkembang
-----	-------------------	--------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

1.	Tata Kelola Persidangan	Penyusunan draf undangan, verifikasi kuorum absensi OPD/Anggota Dewan, kompilasi risalah sidik.	Lembar absensi resmi, skenario jalannya rapat, draf Surat Keputusan (SK) Dewan.	Akurasi data, ketelitian hukum, <i>legal drafting</i> , administrasi publik.
2.	Komunikasi Publik	Dokumentasi audio-visual, penyusunan rilis berita internal, manajemen protokoler pimpinan.	Foto/Video paripurna, draf rilis pers, tata ruang sidang resmi.	<i>Public relations</i> , komunikasi profesional, koordinasi taktis.

Tabel 2. Rekapitulasi Aktivitas Observasi dan Kontribusi Mahasiswa magang dalam rapat paripurna

a. Kontribusi dan Pengembangan Kompetensi dalam Tata Kelola Persidangan

Berdasarkan hasil analisis data, keterlibatan mahasiswa magang pada Sub Bagian Persidangan tidak hanya memberikan dukungan teknis berulang, tetapi juga menjadi media transfer pengetahuan operasional. Dinamika keterlibatan mahasiswa pada bagian persidangan dipaparkan melalui alur kerja nyata sebagai berikut.

1. Koordinasi Lintas Sektoral Awal

Proses penentuan agenda Rapat Paripurna diawali dengan koordinasi tingkat tinggi antara Kepala Bagian, Pimpinan DPRD, dan Badan Musyawarah. Mahasiswa magang berkontribusi dalam mengamati dan mempelajari pola komunikasi formal anta-unit kerja untuk memahami skala prioritas pembentukan produk hukum atau kebijakan daerah.

2. Manajemen Administrasi Pra-Persidangan

Mahasiswa berkontribusi aktif dalam penyusunan draf surat undangan resmi untuk, Gubernur, para Asisten Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi vertikal lainnya. Proses ini menuntut kecermatan tinggi agar audiens yang dihadirkan sesuai dengan relevansi agenda paripurna. Pentingnya peran mahasiswa dalam tahapan administrasi ini ditegaskan oleh Nadhira Nur Faizah S.H (Staf Sub Bagian Persidangan) dalam petikan wawancara berikut: “Mahasiswa sangat membantu bagian persidangan dalam menyiapkan undangan, daftar hadir, dan kebutuhan administrasi lainnya sebelum Rapat Paripurna dilaksanakan.” (Wawancara dengan Staf Persidangan, 12 Maret 2026)

3. Pengelolaan Absensi dan Verifikasi Kuorum

Sebelum sidang dimulai, mahasiswa bertanggung jawab menyusun dan mengelola lembar daftar hadir peserta, baik dari unsur internal anggota legislatif maupun eksternal (OPD). Mahasiswa mengamati secara riil ketentuan legalitas hukum di mana Rapat Paripurna tidak dapat dibuka sebelum memenuhi syarat quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Keterkaitan teknis koordinasi ini digambarkan secara rinci oleh Nadhira Nur Faizah S.H, Staf Sub Bagian Persidangan) melalui kutipan berikut: *"Kalau bagian dari persidangan, kami buat absen untuk kehadiran OPD-OPD, kehadiran anggota. Nah, tapi sebelum adanya absen itu kami harus konfirmasi dulu ke beberapa bagian, terutama Humas kalau mau paripurna itu, siapa yang akan membuka sidang. Baru bagian Humas juga biasa melakukan penyebaran undangan untuk ke OPD-OPD terkait, atau Pak Gubernur, ataupun ke kantor HAM, ataupun ke pengadilan, itu untuk paripurna-paripurna tertentu yang membutuhkan beberapa pihak untuk dihadirkan."* (Wawancara dengan Staff Persidangan, 18 Maret 2026)

4. Penyusunan Skenario dan Risalah Sidang

Mahasiswa diberikan kesempatan strategis untuk membantu penyusunan draf skenario pimpinan (susunan acara dan naskah pembuka/penutup pimpinan sidang) serta risalah rapat paripurna. Risalah ini berfungsi sebagai dokumen otentik negara yang mencatat pandangan umum fraksi, jalannya interupsi, hingga pengambilan keputusan akhir. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangkey, Liando, & Sampe yang menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD berperan menyiapkan materi pembahasan, kebutuhan persidangan, serta dukungan administratif dalam pelaksanaan fungsi DPRD.[10] Melalui tugas ini, kemampuan analisis hukum dan ketelitian naratif mahasiswa meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangkey, Liando, & Sampe yang menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD berperan menyiapkan materi pembahasan, kebutuhan persidangan, serta dukungan administratif dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

5. Digitalisasi dan Pengarsipan

Mahasiswa berkontribusi dalam proses transisi pengarsipan dokumen sidang dari metode konvensional (cetak) ke media penyimpanan berbasis awan (*cloud storage* via Google Drive). Langkah modernisasi ini mempermudah aksesibilitas data bagi pihak-pihak berkepentingan dan menjamin efisiensi birokrasi internal.

b. Kontribusi dan Pengembangan Kompetensi dalam Komunikasi Publik

Peran humas dalam Rapat Paripurna mengarah pada penjagaan citra lembaga serta jaminan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Tahapan kerja teknis yang dialami oleh mahasiswa meliputi :

1. Persiapan Logistik dan Tata Ruang Protokoler

Mahasiswa berpartisipasi langsung dalam penataan ruang sidang, penentuan posisi duduk pimpinan (*seating arrangement*) berdasarkan hierarki jabatan, serta memastikan kesiapan perangkat teknis pendukung seperti sistem tata suara, layar presentasi, hingga penugasan dirijen lagu kebangsaan.

2. Eksekusi Dokumentasi Visual dan Publikasi

Saat Rapat Paripurna berlangsung, mahasiswa magang mengambil peran sebagai tim dokumentasi visual (fotografi dan videografi). Hasil dokumentasi tersebut tidak hanya diarsipkan tetapi diolah menjadi bahan rilis berita yang didistribusikan ke media massa yang menjalin kerja sama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dampak nyata dari kontribusi ini dikonfirmasi oleh Kalsum A. Bachmid, S.STP, M.AP melalui pernyataan berikut : *"Mahasiswa magang sangat membantu dalam mendukung tugas dan fungsi humas protokol, khususnya dalam pelaksanaan Rapat Paripurna, dokumentasi kegiatan, rilis berita, fotografi, dan videografi."* (Wawancara dengan Staf Humas dan Protokol, 25 Maret 2026)

3. Pengawasan Teknis dan Mitigasi Kesalahan

Bersama staf Humas Protokol, mahasiswa terlibat dalam proses *cross-check* akhir terhadap daftar hadir untuk mengawal terpenuhinya quorum keabsahan sidang. Kegiatan pendampingan melekat kepada pimpinan dewan ini melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, kerja sama (*team work*), serta ketahanan kerja di bawah tekanan (*stress management*).

c. Pembahasan Analitis: Keterpaduan Hubungan Antar-Bagian

Temuan penting dalam pengabdian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Rapat Paripurna sangat bergantung pada tingkat sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Sub Bagian Humas Protokol. Hal ini sejalan dengan penelitian Damayanti dan I Nengah Suarmanayasa bahwa semakin baik kemampuan interpersonal, komunikasi, kerja sama tim, serta pengalaman praktik kerja yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja[11]. Hubungan kerja keduanya bersifat sebagai motor penggerak yang saling ketergantungan. Sub Bagian Humas Protokol bertindak sebagai fasilitator teknis, kelancaran acara, dan jembatan informasi publik.

Keterlibatan mahasiswa magang di tengah pusaran sinergi ini memberikan dampak pembelajaran pengalaman yang kuat. Mahasiswa tidak hanya mempraktikkan teori ilmu hukum atau administrasi publik secara kaku, melainkan melihat bagaimana regulasi, tata tertib, dan komunikasi organisasi beroperasi dalam realitas pemerintahan daerah. Pengalaman tersebut mendorong peningkatan kemampuan adaptasi, komunikasi, dan kesiapan kerja mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mayhesya dkk. yang menunjukkan bahwa pengalaman magang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi dunia profesional.[12]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang dalam tata kelola persidangan dan komunikasi publik pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. Melalui partisipasi langsung dalam kegiatan administrasi persidangan, penyusunan notulen dan risalah rapat, dokumentasi kegiatan, penyusunan rilis berita, serta pelaksanaan tugas humas dan protokol, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang mendukung peningkatan kemampuan administrasi, komunikasi, koordinasi, kerja sama tim, dan profesionalisme kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Sub Bagian Humas Protokol berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna. Keterlibatan mahasiswa dalam kedua bidang tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi, tetapi juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD. Dengan demikian, program magang di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menjembatani teori akademik dengan praktik kerja di lingkungan pemerintahan serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja secara profesional.



Gambar 1. Pelaksanaan Rapat Paripurna persiapan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah ke-62



Gambar 2. Mengarsip Surat Keputusan (SK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 Dan Mengarsip Salinan Surat Keputusan (SK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan program magang. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran Sub Bagian Persidangan dan Sub Bagian Humas dan Protokol yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengalaman praktis kepada mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kami menyampaikan penghargaan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan artikel ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Arisandi, M. Widya Mutiara, and V. Christanti Mawardi, "Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkmm) Magang Dan Studi Independen Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa," *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 6, no. 1, pp. 174–181, 2022, doi: 10.24912/jmishumsen.v6i1.16163.2022.
- [2] S. putri dewina santri Salfia and H. E. A. Hanung, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Program Magang Mahasiswa Sebagai Upaya Mencetak Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berdaya Saing," *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 156–164, 2022, doi: 10.59141/comserva.v2i2.215.
- [3] E. Rosmiyati, R. Dwiyaniti, G. Amelia Kumala Sari, S. Dewi, and W. O. Rio, "Krepa: Kreativitas Pada Abdimas," *Krepa Kreat. Pada Abdimas*, vol. 7, no. 5, pp. 35–45, 2025, [Online]. Available: <https://cibinstitute.id/index.php/krepa/article/view/5114>
- [4] D. L. Tampongangoy, "jm_jap,+JURNAL+NOVI," vol. VII, no. 107, pp. 39–51, 2021.
- [5] D. P. Fadila, "Peran Bagian Persidangan Dalam Penyusunan Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis," *J. Ilm. Multidisipin*, vol. 3, no. 11, pp. 822–829, 2025, doi: 10.60126/jim.v3i11.1275.
- [6] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2021 ©2021, 2021. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- [7] O. A. O. Sijuwade Adedayo Ogunsola, Bongani Innocent Dlamini, Nobubele Potwana, Ntombizandile Victoria Sineke, Robert Walter Dumisani Zondo, Adewale Titus Elewode, "Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches," *Open Access Libr. J.*, vol. 11, 2024.
- [8] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods*

Sourcebook, 4th ed. California: Sage Publications, 2021.

- [9] P. D. I. Sekretariat, "PARIPURNA OLEH BAGIAN PERSIDANGAN DAN," 2026.
- [10] S. Sekretariat, "Jurnal governance," vol. 1, no. 2, pp. 1–14, 2022.
- [11] Damayanti and I. N. Suarmanayasa, "Pengaruh Soft Skill dan Pengalaman Magang Terhadap Kesiapan Kerja pada Fresh Graduate Universitas Pendidikan Ganesha," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. dan Ilmu Huk.*, vol. Volume 4, 2026.
- [12] A. S. Gita Wulan Mayhesya, Tutik Susilowati, "Pengaruh Pengalaman Magang Administrasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa", [Online]. Available: https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/77576?utm_